



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

Pengumuman Resmi Hasil Rapimnas Kadin Tahun 2023

Sebagai payung organisasi dunia industri dan usaha di Indonesia yang berlandaskan undang undang dan berfungsi sebagai wadah aspirasi sektor swasta, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam perekonomian nasional sesuai dengan amanat Keppres No. 18 tahun 2022, Kadin Indonesia terus konsisten melaksanakan berbagai program kerja dalam rangka mendukung kinerja pengusaha nasional dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2023 Kadin Indonesia telah melaksanakan 163 program kerja (atau 91% dari total program kerja tahunannya). Program kerja yang telah dilaksanakan oleh Kadin Indonesia berlandaskan 4 pilar utama, yaitu: penguatan kesehatan, pemberdayaan ekonomi daerah dan nasional, pengembangan kewirausahaan dan kompetensi, dan penguatan internal organisasi.

Selain itu, Kadin Indonesia juga telah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2023 dengan tema "Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045" guna berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh perwakilan anggota Kadin yang tersebar di 34 Provinsi dan 519 Kota/Kabupaten dalam rangka menetapkan program kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, serta daya saing pengusaha nasional di tahun 2024.

Berikut ini adalah hasil Rapimnas Kadin tahun 2023:

1. Tinjauan Perekonomian Global

- Sepanjang 2023 kita menyaksikan bahwa ekonomi global dihadapkan dengan ketidakpastian. Setelah pandemi COVID-19, dunia dihadapkan dengan konflik geopolitik yang terus menerus berlangsung di Ukraina, Palestina, maupun pergolakan dengan negara-negara OPEC yang berpeluang memutuskan pengurangan produksi minyak secara drastis. Hal ini berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, volatilitas harga komoditas, meningkatnya harga minyak dunia, serta tekanan terhadap inflasi.
- Akibat ancaman krisis dan resesi, telah menggeser konsentrasi negara-negara di dunia, terutama negara maju untuk menyelamatkan perekonomiannya dan melakukan penundaan terkait dukungan terhadap pencapaian target perubahan iklim. Penundaan ini nyata terlihat dilakukan pemerintah Eropa. Inggris dan Swedia saat ini telah menunda tujuan dan target perubahan iklim mereka dan juga munculnya resistensi dan



skeptisisme yang mulai tumbuh di negara-negara Eropa lainnya. Disisi lain, dengan terjadinya peningkatan suhu secara global, diperkirakan pada 2030 akan menyebabkan penurunan sebesar 38% kapasitas transportasi, mengurangi potensi pertumbuhan perdagangan barang global dalam volume sebesar 5% per tahun. Sementara, kekeringan yang terjadi di kawasan Terusan Panama, telah mengurangi jumlah kapal yang dapat melaluinya, menjadi hanya 18 kapal per hari mulai Februari 2024 nanti, yang gilirannya akan mempengaruhi ekspor AS. Akibatnya, biaya logistik akan melonjak.

- Pada kuartal-IV 2023, International Monetary Fund (IMF) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sekitar 3% tahun ini, turun tipis menjadi 2,9% pada 2024, karena eskalasi risiko geopolitik terus berlanjut dengan pemulihan ekonomi Tiongkok yang lambat. IMF menyampaikan bahwa India (dengan perkiraan pertumbuhan berkisar 6%) dan Tiongkok/China (dengan perkiraan pertumbuhan 5%) menyumbang separuh dari pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dan 2024. Untuk kawasan Asia dan Pasifik tetap akan menjadi kawasan paling dinamis tahun ini dan tahun depan. IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan di Asia Pasifik diperkirakan akan meningkat dari 3,9% pada 2022 menjadi 4,6% pada 2023 yang melambat kembali menjadi 4,2% pada 2024 dan menjadi 3,9% dalam jangka menengah.

2. Tinjauan Perekonomian Nasional

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh di kisaran 5 persen. Hal ini selain dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian dan momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Pasca pandemic Covid-19, ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan, pada Triwulan I tahun 2023 ekonomi tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Selanjutnya, pada Triwulan II tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,17% (yoy) dan pada Triwulan III 2023 pertumbuhan sedikit melambat tercatat sebesar 4,94% (yoy). Pada Triwulan IV 2023 pertumbuhan diperkirakan sekitar 4,5 – 5,3%. Terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik di kisaran 5 persen dikarenakan permintaan kebutuhan domestik seperti belanja pemerintah dan masyarakat yang tetap tinggi.
- Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, sumbangan pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi 2023 relatif lebih kecil dibandingkan pada tahun 2024. Hal ini karena banyak perputaran anggaran belanja di luar pemerintah pada tahun 2024, seperti untuk calon presiden dan calon wakil presiden, serta legislatif daerah dan nasional. Untuk itu, optimalisasi



belanja pemerintah dan realisasi transfer dana ke daerah pada kuartal IV 2023 akan bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2023.

- Pada kuartal III-2023, ekspor secara keseluruhan berkontraksi sebesar 4,26% (yoy) akibat menurunnya permintaan ekspor barang, sejalan dengan perlambatan ekonomi global, lebih dalam dibandingkan kontraksi 2,97% (yoy) pada kuartal II-2023. Sementara impor terkoreksi 6,18% (yoy) pada Juli-September tahun ini, lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,06% pada April-Juni tahun ini. Kondisi ini merupakan kedua kalinya ekspor dan impor berkontraksi sejak kuartal IV-2020 atau delapan kuartal terakhir. Namun ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tetap terjaga, tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), sebagian besar pada triwulan III 2023 tetap mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Pertumbuhan Lapangan Usaha tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap tinggi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 yang tinggi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra).
- Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun demikian, dengan banyaknya kasus korupsi oleh para pejabat dan terseret kasus hukum, mulai Menteri baik yang sudah menjadi tersangka maupun banyak lagi lainnya yang terindikasi melakukan korupsi; ini juga terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lebih parah lagi juga terjadi di lembaga pengawal gerakan anti korupsi yakni KPK, mengakibatkan investor akan enggan untuk melakukan investasi di Indonesia.
- Indonesia membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat hingga menjadi negara maju pada 2045. Hanya saja hal ini akan sulit terjadi, karena banyaknya kasus korupsi oleh pejabat negara. Sasaran yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 yakni PDB Nominal sebesar US\$9,8 triliun dengan GNI (gross national income) per kapita US\$30.300 dan kontribusi manufaktur ditargetkan mencapai 28% dengan serapan



tenaga kerja sebesar 25,2%. Untuk dapat tumbuh lebih sustainable dan mencapai berbagai target di 2045, Indonesia membutuhkan FDI dari saving-investment gap yang besar dan ini tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan ketersediaan tabungan dalam negeri. Untuk target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2%, dibutuhkan investasi dari berbagai pelaku ekonomi sekitar Rp 6.900 triliun.

- Indonesia saat ini menempati peringkat 73 dalam ranking Ease Doing Business 2023 dari 190 negara. Peringkat tersebut stagnan dari 2018 dan Indonesia hanya ada di urutan ke enam di kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam. Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Data ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 99,72% per Juni 2023. Sementara, penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha. Ini menjadi persoalan besar, karena beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar. Semua itu membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

3. Tinjauan Perekonomian tahun 2024

- Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024, ditargetkan pemerintah sekitar 5,2% - 5,5% (yoy). Ini tidak semulus sebagaimana yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dikarenakan berbagai alasan diantaranya krisis multidimensi. Dalam RPJMN tersebut pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam kisaran 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024. Dengan kondisi ini, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, yang berarti rata-rata dalam 10 tahun terakhir hanya mencapai 4,23 persen.
- Ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih stabil di semester II-2024 karena perhelatan pemilihan umum sudah berakhir. Transisi pemerintahan akan dilakukan pada Oktober 2024 dan arah kebijakan rezim mendatang mulai tergambar jelas. Sebaliknya, sepanjang semester I, ketidakpastian masih akan membayangi akibat arah perpolitikan yang belum jelas.
- Pada semester kedua, periode *wait and see* dunia usaha sudah berakhir. Untuk itu diperkirakan laju investasi akan lebih kencang dan penerimaan



negara akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di level 5 persen sepanjang tahun, dunia usaha bisa berjalan kondusif di tengah tahun politik, yang telah dimulai sejak pertengahan 2023 hingga 2024.

4. Mengenai Rapimnas Kadin 2023

- Rapimnas Kadin tahun 2023 mengusung tema “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045” dan fokus pada upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam memasuki tahun pesta demokrasi dan menuju Indonesia Emas 2045.
- Rapimnas Kadin 2023 menghasilkan keputusan melalui tim perumus yang telah bersidang pada tanggal 21 Desember 2023. Beberapa hasil keputusan antara lain:
 - Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja tahun 2023
 - Program Kerja tahun 2024
 - Rekomendasi kepada pemerintah, khususnya terkait aspirasi Indonesia Emas dan Advokasi Kebijakan

5. Penguatan Organisasi Kadin Indonesia: Hasil Sidang Pleno Tim Perumus Komisi A:

Komisi A dalam sidangnya telah menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 telah menggambarkan bahwa Kadin Indonesia sangat aktif dalam kegiatannya dan mampu menjadikan organisasi Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia serta mitra strategis pemerintah, terbitnya Keppres 18/2022 dan telah disempurnakannya 23 Peraturan Organisasi menjadikan Kadin semakin kuat dan solid. Kadin telah membuktikan sebagai mitra strategis Pemerintah dan induk organisasi dunia usaha di Indonesia. Untuk itu, evaluasi pelaksanaan program kerja keorganisasian Kadin Indonesia tahun 2023 dapat diterima secara utuh oleh seluruh peserta Sidang Komisi keorganisasian. Dalam kaitan ini, sebagian besar program keorganisasian tahun 2023 telah dilaksanakan secara baik. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa program perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi pada tahun 2024.

- Program Kerja Kadin Indonesia tahun 2024 terkait keorganisasian yang telah disiapkan oleh masing-masing Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan di lingkungan Kadin Indonesia, dinilai sudah baik dan sangat memadai. Program Kerja keorganisasian untuk tahun 2024 sudah mengacu pada 4 Pilar Program Utama dan 17 Program Umum Kadin Indonesia tahun 2021 – 2026.



- Komisi A menyetujui dan menyetujui Rancangan Program Kerja Kadin 2024 terkait keorganisasian dapat ditetapkan sebagai Program Kerja yang akan dilaksanakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia pada tahun 2024 (Link Program Kerja Kadin Indonesia <http://tinyurl.com/prokerrapimnas2023>), serta tambahan berdasarkan kesepakatan dalam sidang komisi A untuk melengkapi program kerja sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam Program Kerja Kadin 2024, adalah sebagai berikut:
 1. Menerbitkan surat Edaran kepada seluruh jajaran Kadin, baik di tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai larangan keterlibatan organisasi Kadin dalam kegiatan politik praktis.
 2. Melaksanakan Dialog Ekonomi Capres sebagai forum bagi Kadin dalam memberikan masukan terkait Gagasan atau Pokok-pokok Pembangunan Ekonomi Nasional ke depan yang perlu diperhatikan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam 9-10 bulan ke depan bagi perkembangan perekonomian bangsa serta memposisikan pentingnya peran Kadin sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
 3. Melaksanakan Program Kampanye Keanggotaan Baru yang dilakukan secara permanen dan terus-menerus pada Kadin di semua tingkatan.
 4. Melakukan integrasi sistem keanggotaan Kadin dengan ALB, mekanisme pembayaran keanggotaan sekaligus baik sebagai anggota Kadin maupun ALB
 5. Pembentukan Kelompok Kerja untuk menginisiasikan langkah konkrit dalam membantu para pelaku usaha di Provinsi/Kabupaten/Kota dan daerah-daerah terpencil, terutama kepada para pelaku usaha menengah ke bawah.
 6. Mensosialisasikan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah ditandatangani sampai ke Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota sehingga dapat ditindaklanjuti di daerah.
 7. Kerja sama antara Kadin dan Pemerintah untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045.
 8. Kerja sama antara Kadin dan Pemerintah dalam mencapai target-target ekonomi yaitu kenaikan ekonomi sampai 2 triliun dari pengembangan *Digital Economic Framework Agreement* (DEFA) di ASEAN dan pemanfaatan kapasitas *carbon capture* sebesar 70%



untuk domestik dan 30% untuk luar negeri yang nilai ekonominya bisa sampai 120 triliun.

9. Mendesak Pemerintah untuk mempersyaratkan keanggotaan Kadin dalam pengurusan NIB dalam Online Single Submission (OSS).
10. Sambil menunggu implementasi OSS, maka untuk sementara harus adanya Peraturan Gubernur atau sejenisnya yang mewajibkan perusahaan di daerah perlu menjadi Anggota Kadin.
11. Koordinasi secara berkala antara Kadin dan Anggota Luar Biasa untuk mengatasi masalah keanggotaan Kadin.
12. Melaksanakan dialog terbuka, konsultasi publik dan forum diskusi secara berkala oleh Kadin, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
13. Mengadakan workshop dan pelatihan oleh Kadin yang menunjang peningkatan dunia usaha seperti perizinan/legalitas, pemasaran, branding, dll.
14. Kadin memiliki lembaga sertifikasi kembali sehingga meningkatkan kredibilitas badan usaha.
15. Mewajibkan Anggota Kadin yang terdaftar di Kadin Indonesia untuk tetap berkoordinasi dengan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Anggota Kadin berinvestasi.
16. Mempercepat proses transfer hasil Perimbangan Pembagian Keuangan keanggotaan dari Kadin Indonesia kepada Kadin Provinsi dan Kadin Kab/Kota.
17. Mengatur tata cara pengaturan teknis jika pengurus (Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus) berhalangan sementara karena kegiatan Politik atau kegiatan lainnya dalam waktu tertentu sehingga tidak menjalankan tugas sehari-hari
18. Membentuk Wakil Ketua Umum yang menangani Organisasi Pengusaha (Ikatan/Himpunan) dan Organisasi Perusahaan (Asosiasi/Gabungan) di Kadin tingkat Provinsi
19. Mendorong Kadin Indonesia dan ALB Kadin tingkat nasional melakukan sosialisasi kepada Kadin di Daerah yang mewajibkan Organisasi Pengusaha (Ikatan/Himpunan) dan Organisasi Perusahaan (Asosiasi/Gabungan) di tingkat Provinsi mendaftarkan menjadi ALB Kadin di tingkat Provinsi/kab/Kota
20. Mendorong Kadin di semua tingkatan melakukan sosialisasi Keppres No. 18/2022 secara massif sampai ke semua pemangku



kepentingan di tingkatan masing-masing yakni Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sampai kepada para kepala Dinas, Organisasi Perusahaan (Asosiasi/Gabungan), dan Organisasi Pengusaha (Himpunan/Ikatan).

6. Program Kerja Kadin Indonesia tahun 2024

Komisi B - Program Kerja dalam sidangnya telah menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Program Kerja Kadin Indonesia tahun 2024 yang telah disiapkan oleh masing-masing Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan di lingkungan Kadin Indonesia, dinilai sudah baik dan sangat memadai. Program Kerja untuk tahun 2024 sudah mengacu pada 4 Pilar Program Utama dan 17 Program Prioritas Kadin Indonesia tahun 2021 – 2026. (Link Program Kerja Kadin Indonesia: <http://tinyurl.com/prokerrapimnas2023>)

Komisi B menyetujui dan menyepakati Rancangan Program Kerja Kadin 2024 dapat ditetapkan sebagai Program Kerja yang akan dilaksanakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia pada tahun 2024, serta tambahan berdasarkan kesepakatan dalam sidang komisi B untuk melengkapi program kerja sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam Program Kerja Kadin 2024, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong UMKM untuk memiliki daya saing yang lebih kompetitif, kapasitas produksi yang lebih besar, dan menghasilkan produk - produk dengan kualitas global berfokus pada sektor tertentu bahan baku dan sumber daya yang hanya tersedia di Indonesia.
2. Kadin Indonesia perlu lebih "bersuara" dan menampakkan aktivitas kegiatan serta perjuangannya, untuk menjaga sentimen positif dunia usaha, meskipun dihadapkan pada tantangan politik nasional dan ekonomi global.
3. Melanjutkan program sinergi Kadin Indonesia dengan Daerah yang saat ini telah dijadikan sebagai program wajib bagi Pengurus Harian Kadin Indonesia.
4. Mendorong untuk terus mensosialisasikan MoU dan PKS antara Kadin Indonesia dengan instansi di tingkat pusat maupun negara/lembaga internasional yang sudah ditandatangani sampai ke Kadin Provinsi dan Kadin Kab/Kota, sehingga dapat ditindaklanjuti di daerah (Link Daftar MoU dan PKS: <http://tinyurl.com/moupkskadin>).



5. Mendorong untuk terus meningkatkan komunikasi antara WKU Koordinator Wilayah dengan Kadin-Kadin Provinsi guna memahami permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah dan memfasilitasi solusinya.
6. Menindaklanjuti hasil Rakernas ALB, merekomendasikan kepada Kadin Indonesia agar mengadakan FGD berdasarkan 15 (lima belas) *cluster* permasalahan/ masukan masing-masing bidang dan sektor terkait untuk dapat menghasilkan *white paper* dan berperan mewakili pengusaha Indonesia dalam advokasi dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah, DPR RI, DPD RI dalam rancangan peraturan perundangan yang terkait dunia usaha.

7. Aspirasi Indonesia Emas 2045

Sebagai mitra strategis, Kadin Indonesia mengajak pemerintah untuk menjadikan gerakan bersama untuk melaksanakan aspirasi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

- **Meningkatkan resiliensi**
Membangun resiliensi kesehatan yang unggul serta membangun ekosistem ketahanan pangan dan ketahanan energi melalui swasembada serta kemampuan dalam penanggulangan bencana alam.
- **Mendorong kesejahteraan**
Mengembangkan sektor bernilai ekonomi tinggi dengan membuka potensi *lighthouses (advance manufacture)* di sektor manufaktur strategis, hilirisasi di sektor pertanian dan sumber daya alam, meningkatkan pertumbuhan jasa keuangan, membangun destinasi ekowisata kelas dunia, mewujudkan potensi pemain kreatif global, mengakselerasi UMKM melalui huluisasi dan hilirisasi menjadi perusahaan menengah berdaya saing global, serta meningkatkan potensi kelautan dan perikanan.
- **Memperkuat inklusi**
Menjadi model transformasi ekosistem layanan kesehatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
- **Memajukan keberlanjutan**
Menjadi rujukan dunia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan dekarbonisasi industri yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060.
- Untuk mendapatkan Buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045, silahkan pindai barcode berikut: [Peta Jalan Indonesia Emas 2045](#)

